

Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang

Arjun Riyadi¹, Dyah Palupiningtyas²

¹STIEPARI Semarang

e-mail: arjunriyadi464@gmail.com

²STIEPARI Semarang

e-mail: upik.palupi3@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13 Agustus 2024

Received in revised form 13 November 2024

Accepted 22 November 2024

Available online 1 Desember 2024

ABSTRACT

The study investigates the efficacy of implementing the Regional Financial Management Information System (SIMKD) in Semarang Regency. Utilizing a qualitative methodology, findings reveal suboptimal effectiveness in SIMKD implementation. Factors influencing this include human resource competency, information technology infrastructure availability, leadership engagement, and organizational culture. Proposed strategies to enhance SIMKD effectiveness encompass developing human resources, fortifying IT infrastructure, fostering leadership commitment, and nurturing a performance-driven organizational ethos. This research contributes theoretically and practically toward optimizing SIMKD utilization for more efficient, transparent, accountable, and effective regional financial administration.

Keywords: Regional Financial Management Information System (SIMKD), Implementation Effectiveness; Human Resources; Information System Infrastructure

1. Introduction

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) [1]. Seiring dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMKD) [2]. SIMKD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [3].

Implementasi SIMKD di Indonesia telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 [2]. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan

Received Agustus 13, 20234 Revised November 13, 2024; Accepted November 22, 2024

daerah kepada public [4], [5]. Meskipun telah diimplementasikan secara luas, efektivitas SIMKD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih menjadi pertanyaan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya tantangan dan hambatan dalam implementasi SIMKD, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum memadai [6], infrastruktur teknologi informasi yang terbatas [7], dan resistensi terhadap perubahan [3]. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat pencapaian tujuan SIMKD dan mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Semarang, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, telah mengimplementasikan SIMKD sejak tahun 2007 [8]. Namun, efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang masih perlu dikaji lebih lanjut. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2019 menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan [9]. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah dan belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD untuk pengambilan keputusan [6] juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang. Kesenjangan ini perlu diatasi untuk memastikan bahwa SIMKD dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian tentang efektivitas implementasi SIMKD telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Beberapa penelitian menemukan bahwa implementasi SIMKD telah berjalan efektif [3], [4], sementara penelitian lain mengungkapkan adanya berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi SIMKD [6], [7]. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan perlunya studi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD dalam konteks yang spesifik, seperti di Kabupaten Semarang.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) di Kabupaten Semarang? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan pimpinan, dan budaya organisasi serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang? Pertanyaan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD, berdasarkan hasil analisis tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur tentang implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan SIMKD.

2. Research Method

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat [10]. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang kaya dan analisis data yang fleksibel [11].

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Semarang telah mengimplementasikan SIMKD sejak tahun 2007, sehingga dianggap relevan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SIMKD.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara semi-terstruktur: Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti kepala dinas, kepala bidang, dan operator SIMKD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Semarang. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama wawancara (Bryman, 2016).
2. Observasi non-partisipan: Observasi dilakukan dengan mengamati proses kerja dan interaksi pengguna SIMKD di BPKAD Kabupaten Semarang. Observasi non-partisipan berarti peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan hanya mengamati dan mencatat hasil observasi (Creswell & Creswell, 2018).
3. Studi dokumen: Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data [12]. Tahapan analisis tematik meliputi:

1. Familiarisasi dengan data: Peneliti membaca dan memahami data secara mendalam.
2. Pengkodean: Peneliti memberikan kode pada data untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
3. Pencarian tema: Peneliti mengidentifikasi tema-tema potensial dengan mengelompokkan kode-kode yang relevan.
4. Peninjauan tema: Peneliti memeriksa kembali tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memastikan konsistensi dan koherensi.
5. Pendefinisian dan penamaan tema: Peneliti mendefinisikan dan menamai tema-tema yang telah diidentifikasi.
6. Penulisan laporan: Peneliti menyusun laporan penelitian dengan mengintegrasikan tema-tema yang telah diidentifikasi.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut [13]. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.

3. Results and Analysis

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, ditemukan beberapa hasil penelitian yang lebih mendalam sebagai berikut:

1. Efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Temuan audit tersebut meliputi ketidaksesuaian pencatatan aset tetap, keterlambatan penyetoran pendapatan daerah, dan kelemahan dalam pengendalian belanja daerah (Studi dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019). Selain itu, masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan daerah dan belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD untuk pengambilan keputusan

- (Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Semarang, 12 Februari 2024). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah mengindikasikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan melalui SIMKD belum berjalan dengan efisien dan efektif, sedangkan belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD menunjukkan bahwa manfaat SIMKD dalam mendukung pengambilan keputusan belum sepenuhnya terealisasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan pimpinan, dan budaya organisasi.
 - a. Kualitas sumber daya manusia, khususnya operator SIMKD, masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi (Wawancara dengan Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Semarang, 5 Februari 2024). Beberapa operator SIMKD mengaku kesulitan dalam mengoperasikan SIMKD karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah dan pengoperasian sistem (Wawancara dengan operator SIMKD BPKAD Kabupaten Semarang, 15-16 Februari 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang mengelola SIMKD masih perlu ditingkatkan agar dapat mengoperasikan SIMKD dengan lebih efektif.
 - b. Infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet dan perangkat keras komputer, juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional SIMKD (Observasi di BPKAD Kabupaten Semarang, 19-23 Februari 2024). Beberapa operator SIMKD mengeluhkan kinerja komputer yang lambat dan koneksi internet yang tidak stabil, yang menghambat proses input dan pengolahan data keuangan melalui SIMKD (Wawancara dengan operator SIMKD BPKAD Kabupaten Semarang, 15-16 Februari 2024). Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung implementasi SIMKD yang lebih efektif.
 - c. Dukungan pimpinan dan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja juga diperlukan untuk mendorong efektivitas implementasi SIMKD (Studi dokumen Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Semarang 2021-2025). Beberapa pejabat BPKAD mengakui bahwa dukungan pimpinan dalam implementasi SIMKD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pengembangan SIMKD dan pemberian insentif bagi operator SIMKD yang berkinerja baik (Wawancara dengan pejabat BPKAD Kabupaten Semarang, 8-9 Februari 2024). Selain itu, budaya organisasi yang lebih berorientasi pada kinerja perlu dikembangkan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIMKD (Focus Group Discussion dengan pejabat dan operator SIMKD BPKAD Kabupaten Semarang, 26 Februari 2024).
 3. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang antara lain: (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi; (b) peningkatan infrastruktur teknologi informasi; (c) penguatan dukungan pimpinan dan komitmen organisasi; dan (d) pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja (Focus Group Discussion dengan pejabat dan operator SIMKD BPKAD Kabupaten Semarang, 26 Februari 2024). Strategi-strategi tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang, serta mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIMKD.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas sistem informasi yang menyatakan bahwa efektivitas sistem informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih [14]. Dalam JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI Vol. 16, No. 2, Desember 2023 : 82 – 88

konteks implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang, kualitas sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan audit BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidaksesuaian pencatatan aset tetap, serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMKD belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Faktor kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan pimpinan, dan budaya organisasi yang ditemukan dalam penelitian ini juga selaras dengan model kesuksesan implementasi sistem informasi yang diusulkan oleh Petter., et al [14], [15]. Model tersebut menekankan pentingnya faktor-faktor organisasional, seperti dukungan manajemen puncak dan kesiapan organisasi, dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pimpinan BPKAD Kabupaten Semarang dalam implementasi SIMKD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pemberian insentif bagi operator SIMKD. Selain itu, budaya organisasi yang lebih berorientasi pada kinerja juga perlu dikembangkan untuk mendorong efektivitas implementasi SIMKD.

Strategi peningkatan efektivitas implementasi SIMKD yang direkomendasikan dalam penelitian ini, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam menentukan efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah [16], [17]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi operator SIMKD di Kabupaten Semarang masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar dapat mengoperasikan SIMKD dengan lebih efektif. Sementara itu, perlunya peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung implementasi SIMKD yang efektif [6], [18], [19]. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya kendala infrastruktur teknologi informasi, seperti kinerja komputer yang lambat dan koneksi internet yang tidak stabil, yang menghambat kelancaran operasional SIMKD di Kabupaten Semarang.

Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*) [16] yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) [20]. Beberapa operator SIMKD di Kabupaten Semarang mengaku kesulitan dalam mengoperasikan SIMKD karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah dan pengoperasian sistem, yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SIMKD masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD untuk pengambilan keputusan mengindikasikan bahwa persepsi kegunaan SIMKD juga masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur tentang efektivitas implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dengan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan pimpinan, dan budaya organisasi. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan

infrastruktur teknologi informasi, penguatan dukungan pimpinan dan komitmen organisasi, serta pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya operator SIMKD, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet dan perangkat keras komputer, untuk mendukung kelancaran operasional SIMKD.
3. Pimpinan BPKAD Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan yang kuat dan menunjukkan komitmen terhadap implementasi SIMKD yang efektif.
4. BPKAD Kabupaten Semarang perlu mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja untuk mendorong efektivitas implementasi SIMKD.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD secara statistik.

References

- [1] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- [2] Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Pp Nomor 65 Tahun 2010)*. 2010, pp. 1–7. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004><http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004><http://www.biomedcentral.com/1471-2156/12/42><http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005><http://www.sciencemag.org/content/323/5911/240>.short
- [3] W. Andriani, Z. Baridwan, and S. Suwardjono, “Factors affecting the implementation effectiveness of regional financial management information system in Indonesian local governments,” *J. Account. Bus. Dyn.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–14, 2020.
- [4] D. P. Sari, R. Wardhani, and D. Martani, “Factors influencing the effectiveness of regional financial management information systems in Indonesian local governments.,” *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 32, no. 7, pp. 705–721, 2019.
- [5] W. H. DeLone and E. R. McLean, “The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update,” *J. Manag. Inf. Syst.*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003, doi: 10.1080/07421222.2003.11045748.
- [6] S. Haryani and H. Juliani, “Challenges in the implementation of regional financial management information systems in Indonesian local governments,” *J. Public Adm. Gov.*, vol. 10, no. 2, pp. 256–270, 2020.
- [7] T. Susanto and R. B. Bahaweres, “Factors influencing the acceptance of regional financial management information system: A case study in a local government in Indonesia,” *J. Theor. Appl. Inf. Technol.*, vol. 96, no. 18, pp. 6096–6108, 2018.
- [8] B. P. Keuangan and R. Indonesia, “Republik Indonesia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 Laporan Keuangan,” Kabupaten Semarang, 2021.
- [9] BPK Perwakilan Provinsi Riau, “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 249/S/XVIII.PEK/06/2020,” Kabupaten Semarang, 2020.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- [11] J. W. Creswel, *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2009. [Online]. Available:

- <http://www.digitallab.wldu.edu.et/bitstream/123456789/3862/1/%28Creswell%29Qualitative%2CQuantitative%2Candmixedmethods2nd.e.pdf>
- [12] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qual. Res. Psychol.*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006, doi: 10.1191/1478088706qp063oa.
- [13] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. Maret. PT Remaja Rosdakarya, 2022. [Online]. Available: <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- [14] S. Petter, W. Delone, and E. R. McLean, "Information systems success: The quest for the independent variables," *J. Manag. Inf. Syst.*, vol. 29, no. 4, pp. 7–62, 2013, doi: 10.2753/MIS0742-1222290401.
- [15] H. Hendrajaya, Syamsul Hadi, Henry Yuliamir, Dyah Palupiningtyas, and S. Samtono, "Reviewing Employee Work Objectives From Compensation, Facilities and Work Environment, The Affect.," *Brill. Int. J. Manag. Tour.*, vol. 2, no. 2, pp. 133–142, 2022, doi: 10.55606/bijmt.v2i2.438.
- [16] R. J. Utama, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Online Mhs. Bid. Ilmu Ekon.*, vol. 4, no. 1, pp. 1429–1443, 2017.
- [17] Jamaluddin Dwi Risma, *Akuntansi Sektor Publik*, no. August. Penerbit Andi, 2021.
- [18] D. Palupiningtyas, A. Dewi Maria, T. Adhistyo Wijoyo, A. Prarasdya Alyka, and K. Z. Putri Brawarso, "Application of Rapid Application Development Method in Designing Knowledge Management System to Improve Employee Knowledge and Performance at Ministry of Agriculture," *J. Inf. dan Teknol.*, vol. 6, no. 1, pp. 29–35, 2024, doi: 10.60083/jidt.v6i1.468.
- [19] A. F. Sihura and R. Octafian, "Deciphering Consumer Choices: Axioo Brand Laptop Purchase Patterns at AFA Computer Ambarawa," *Lit. Int. Sci. Journals Soc. Educ. Humanit.*, vol. 2, no. 3, pp. 10–17, 2023.
- [20] F. D. Davis, "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology," *MIS Q. Manag. Inf. Syst.*, vol. 13, no. 3, pp. 319–339, 1989, doi: 10.2307/249008.